

SUMBER VISUAL SEBAGAI MEDIA REKONSTRUKSI SEJARAH: STUDI KASUS LAMBANG PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA

**Oleh
Reiza D. Dienaputra**

Pengantar

Charles-Victor Langois dan Charles Seignobos dari Universitas Sorbonne, Paris, mengatakan bahwa, “The historian works with documents...There is non substitute for documents: no documents, no history”. (Dienaputra, 2004). Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tanpa dokumen maka tidak ada sejarah, atau dengan kata lain, sejarah tidak mungkin direkonstruksi tanpa adanya dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud dalam pernyataan tersebut lebih mengarah kepada dokumen dalam pengertian sempit, yakni, sumber tertulis. Dengan demikian, menurut pernyataan tersebut sejarah hanya bisa direkonstruksi hanya berdasarkan sumber tertulis.

Pandangan seperti tersebut seakan mendominasi kuat para sejarawan serta karya-karya sejarah, setidaknya hingga abad ke-19. Dengan demikian, ranah sejarah seakan tidak memberi ruang hidup sama sekali bagi sejarawan yang menulis sejarah tanpa sumber tertulis ataupun karya sejarah yang dibuat dengan tidak berdasarkan sumber tertulis. Dalam kondisi seperti itu, sumber tertulis seakan-akan menjadi satu-satunya sumber sejarah yang dianggap kredibel atau memiliki kredibilitas. Di luar itu, tidak ada satupun sumber sejarah yang memiliki kredibilitas.

Pandangan hegemonistik dalam ranah sejarah tersebut dalam perkembangannya kemudian banyak mendapat tantangan. Terutama saat sumber sejarah “jenis” lain menampilkan bentuknya menjadi sumber sejarah yang juga sangat layak untuk dipercaya. Sumber lain tersebut adalah sumber lisan. Sebenarnya penggunaan sumber lisan dalam ranah sejarah telah berlangsung sangat lama. Kurang lebih 2400 tahun yang lalu, Thucydides melakukan wawancara (*interview*) langsung dengan para aktor sejarah dalam Perang Peloponesia, yakni para prajurit yang terlibat dalam perang tersebut dan hasil wawancaranya, meskipun tentunya dalam bentuk yang masih sangat sederhana ia tuliskan

dalam bentuk tulisan. Kerja Tucydides dalam merekonstruksi Perang Peloponesia, *Histoire de la Guerre du Peloponnese* (Paris: Garnier-Freres, 1966), bisa dikatakan sebagai kerja tertua dalam menggarap sumber lisan berbentuk sejarah lisan. Namun demikian, keberadaan sumber lisan ini untuk jangka waktu yang demikian panjang kalah pamor dibandingkan sumber tertulis.

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi, keberadaan sumber lisan sebagai sumber sejarah tampak semakin hari semakin penting. Bahkan dalam perkembangannya yang paling mutakhir, akibat kecenderungan terjadinya *paperless culture* (budaya nirkertas) besar kemungkinan akan menempatkan sumber lisan sebagai sumber sejarah penting, yang bisa jadi akan menggeser kedudukan sumber tertulis.

Keramahan ilmu sejarah terhadap sumber lisan sebagai sumber sejarah tentu bukan akhir dari semua perjuangan untuk menjadikan ilmu sejarah lebih terbuka dan membuka diri. Ilmu sejarah, yang terbukti ramah dengan perkembangan teknologi, tampaknya harus pula memberi tempat yang lebih luas bagi upaya pemanfaatan sumber visual sebagai media rekonstruksi sejarah.

Rekonstruksi Sejarah

Di dalam ilmu sejarah, dikenal adanya dua buah konstruk sejarah. Pertama, sejarah dalam arti objektif, yakni peristiwa atau kejadian sejarah itu sendiri. Kedua, sejarah dalam arti subjektif, yakni sejarah sebagai hasil rekonstruksi masa lampau. Sejarah dalam konstruksinya yang pertama sering disebut pula sebagai sejarah sebagai peristiwa.

Sejarah dalam arti subjektif adalah sejarah yang merupakan produk rekonstruksi dari peristiwa sejarah atau bangunan yang disusun penulis (rekonstruktor) sebagai suatu uraian atau ceritera. Adanya pernyataan bahwa “kita harus belajar dari sejarah” maka sejarah yang dimaksud adalah sejarah dalam arti subjektif. Hal ini secara sederhana dapat dipahami dengan mengingat bahwa cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa sejarah pasti akan berbeda antara satu dengan lainnya. Cara pandang ini pada dasarnya secara substansial merepresentasikan sebuah subyektifitas dalam merekonstruksi sebuah bangunan sejarah. Bila kemudian dicari analoginya dalam bentuk visual, bangunan sejarah produk rekonstruktor tentunya lebih bisa dianalogikan dengan sebuah lukisan daripada sebuah potret. Potret merupakan hasil sebuah rekonstruksi peristiwa sejarah yang sifatnya relatif utuh dan lengkap dan sejarah dalam arti subjektif pada dasarnya tidak mungkin mencapai itu semua, sementara lukisan merupakan hasil sebuah rekonstruksi dari sudut pandang yang terbatas

sehingga sudah pasti tidak akan utuh dan lengkap sebagaimana yang sesungguhnya tampak di permukaan. Lukisan tampil melalui proses mengingat yang sudah pasti akan ada yang terlewatkan di dalamnya dan itulah pada dasarnya sejarah dalam arti subjektif.

Sejarah dalam arti subjektif atau sejarah sebagai kisah direkonstruksi dari empat jenis sumber sejarah, yakni, tertulis, benda, lisan, dan visual. Sumber tertulis misalnya, surat kabar, majalah, lembaran negara, dokumen (dari bahasa latin *docere* yang berarti mengajar), notulen rapat, kontrak kerja, surat-surat, bon-bon, dan laporan-laporan. Sumber benda, misalnya, foto-foto, bangunan-bangunan, makam, dan tugu-tugu peringatan. Sumber visual, adalah rekaman-rekaman gambar hidup, seperti, rekaman peristiwa, rekaman peringatan, dan rekaman berita-berita televisi. Sumber lisan, yakni sumber sejarah yang berbentuk lisan atau menghasilkan suara. Sumber lisan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok besar, tradisi lisan, rekaman suara (rekaman rapat, pidato, ceramah, dan sebagainya), dan sejarah lisan.

Optimalisasi Sumber Visual

Keberadaan sumber visual dalam studi sejarah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Gilbert J. Garraghan (1957), secara implisit mengatakan bahwa di samping *oral sources* dan *written sources*, klasifikasi lain yang merupakan sumber sejarah resmi adalah *picture (pictorial)* atau *figure (figured)*. Menurut Garraghan, transmisi data sejarah melalui gambar dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti, *monumental transmission*, *ornamental transmission*, *graphic transmission*, *photographic transmission*, dan *phonographic transmission*. Transmisi melalui monumen tampak antara lain dalam bentuk piramid, bangunan candi, bangunan gereja, bangunan-bangunan bersejarah serta patung dan lukisan. Transmisi melalui ornamen tampak antara lain dalam detail-detail dekoratif yang terdapat dalam karya-karya patung atau lukisan bernilai sejarah yang terdapat dalam bangunan-bangunan. Demikian juga gambar-gambar bersejarah yang terdapat di dalam kertas kulit (*parchment*, perkamen), dan buku-buku. Transmisi melalui grafis tampak dalam pembuatan gambar-gambar dalam peta, sketsa topografi, perencanaan kota, tabel-tabel statistik, peralatan antropometrik dalam catatan kriminal, seperti sidik jari. Transmisi melalui fotografi, tampak dalam berbagai proses fotografi, seperti *photostat* (fotostat, fotokopi), mikrofilm, microprint, dan gambar bergerak. Transmisi melalui fonograf tampak dalam berbagai rekaman suara manusia atau bentuk-bentuk suara lainnya yang terdapat dalam fonograf.

Klasifikasi sumber sejarah versi Garaghan sebagaimana diuraikan di atas secara eksplisit menempatkan sumber visual (*picture* atau *figure*) sebagai salah satu sumber penting dalam sejarah. Kedudukannya adalah sama penting dengan sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedudukan penting sumber visual sebagai salah satu sumber resmi sejarah, dalam prakteknya di lapangan dapat dikatakan kurang banyak dilirik oleh para sejarawan atau para penulis sejarah. Mayoritas sejarawan tampaknya lebih tertarik untuk hanya menggunakan sumber tertulis sebagai media rekonstruksi sejarah. Kondisi ini memang didukung oleh sangat berlimpahnya sumber-sumber tertulis sehingga memudahkan sejarawan untuk bekerja.

Merananya nasib sumber visual di tangan para sejarawan tentu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Di samping kemudahan dalam menggunakan sumber tertulis, faktor lain yang juga telah menyebabkan terpinggirkannya sumber visual adalah dikarenakan masih tumbuhnya keyakinan yang kuat di kalangan sejarawan ataupun penulis sejarah bahwa sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang dianggap paling kredibel. Di luar keunggulan klasik yang dimiliki oleh sumber tertulis, minimnya penggunaan sumber visual sebagai media rekonstruksi sejarah bisa jadi pula diakibatkan oleh adanya kesulitan para sejarawan dalam membaca dan terlebih memaknai sumber-sumber visual dalam upaya melakukan rekonstruksi sejarah. Dengan kondisi tersebut, jelaslah perlu ada upaya-upaya yang signifikan dan optimal dari para sejarawan untuk memanfaatkan sumber visual sebagai media rekonstruksi sejarah. Terlebih, realitas menunjukkan bahwa sejarah Indonesia pun sebenarnya kaya akan sumber-sumber visual.

Studi Kasus: Lambang Partai Politik

Berangkat dari realitas yang kurang begitu menggembirakan berkaitan dengan nasib sumber visual, penulis menjadi tertarik untuk memulai sebuah langkah baru, berupa pemanfaatan sumber visual sebagai media rekonstruksi sejarah. Dengan relatif kayanya sumber visual yang dimiliki bangsa ini, sebenarnya banyak pilihan sumber visual yang bisa dimanfaatkan. Tetapi, pilihan kali ini jatuh kepada gambar lambang-lambang partai politik di Indonesia.

Pendekatan visual dalam mengamati perjalanan partai politik di Indonesia menjanjikan banyak hal menarik, mengingat keberadaan partai-partai politik tersebut tidak dapat dilepaskan dari lambang atau simbol yang menyertainya. Kesemua partai politik menjadikan lambang sebagai identitas kepartaiannya sekaligus media untuk mempengaruhi aspirasi masyarakat.

Melihat begitu banyaknya partai politik yang pernah eksis di pentas politik Indonesia maka pada dasarnya sebanyak itu pulalah jumlah lambang partai politik yang menyertainya. Lambang-lambang partai politik sama halnya dengan keberadaan partai politik itu sendiri mengalami berbagai penataan dan perubahan. Seiring pula dengan eksistensi partai politiknya, ada lambang-lambang partai politik yang bertahan lama dan ada pula yang menghilang dan tidak eksis lagi mengikuti jejak partai politiknya. Penataan dan perubahan lambang partai politik dengan demikian hanya terjadi pada partai-partai politik yang berhasil mempertahankan eksistensinya dalam waktu yang relatif lama.

Seiring pula dengan jatuh banggunya partai politik, terjadi pula muncul tenggelamnya lambang-lambang partai politik. Kemunculan lambang yang menyertai kemunculan sebuah partai politik tentu tidak sekedar memperlihatkan kelahiran sebuah partai politik baru tetapi juga memperlihatkan lahirnya sebuah proses simbolisasi atas sebuah partai politik. Simbolisasi partai politik dalam bentuk lambang tentu menyajikan banyak hal yang dapat diamati. Ia tidak saja merepresentasikan budaya yang melingkupi partai politik tetapi juga bisa jadi budaya masyarakat secara keseluruhan. Pilihan simbol yang dijadikan lambang partai politik tidak sekedar ingin merepresentasikan citra partai politik tetapi bisa jadi juga ingin merepresentasikan sesuatu yang dipandang akrab dengan budaya visual masyarakat. Keberadaan sebuah lambang partai politik tidak saja memperlihatkan gambar-gambar partai politik tetapi juga sekaligus memperlihatkan kemajuan teknologi visual serta perkembangan kreativitas seni dan desain.

Berpijak pada realitas tersebut, salah satu contoh kasus yang akan menarik untuk diamati adalah berkaitan dengan pilihan objek yang digunakan dalam lambang-lambang tersebut. Dari tampilan lambang-lambang partai politik, kini seakan telah terpateri dalam benak masyarakat politik Indonesia bahwa banteng merupakan representasi dari aliran nasionalis, sementara bulan dan bintang merupakan representasi dari aliran agama. Pendekatan baru dalam pengklasifikasian partai politik dilakukan Kevin Evans (2009) terhadap partai-partai politik peserta Pemilu 2009. Berdasarkan parameter posisi agama Islam dalam ranah umum, Kevin Evans (2009) membagi partai-partai politik peserta Pemilu 2009 dalam tiga kelompok kekuatan politik atau 3B. Pertama, Bantengis (kiri). Kedua, kelompok bintangis (kanan). Ketiga, kelompok beringinis (menengah). Model pengelompokan kekuatan yang dilakukan Evans ini bila dicermati dengan baik dapat pula diterapkan pada partai-partai politik peserta Pemilu semasa orde baru dan sesudah orde baru. Model pengelompokan

versi Evans ini sekaligus pula dapat dikatakan sebagai model pengelompokan yang sarat dengan pertimbangan visual.

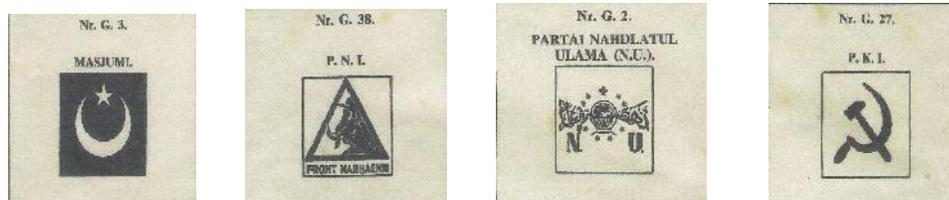
Selanjutnya, pada saat objek tersebut diterjemahkan dalam perlambangan, maka muncul pulalah tampilan yang beragam, sesuai dengan kebutuhan dan jiwa zaman (*zeitgeist*). Dalam konteks inilah, aspek kesenirupaan dan desain memegang peranan penting karena lambang-lambang partai politik tersebut kemudian secara otomatis akan menjadi sebuah karya seni. Manakala lambang menjadi sebuah karya seni maka tujuan pembuatan lambang partai politik pun bisa dikatakan akan sejalan dengan maksud dan tujuan seni itu sendiri, yang sebagaimana dikatakan Lois Fichner-Ratus (1995), antara lain, meliputi tujuan untuk menciptakan keindahan, mengekspresikan nilai-nilai religius, merefleksikan konteks sosial dan budaya, mengangkat kejadian sehari-hari serta memenuhi kebutuhan kesenimanan itu sendiri. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Fichner-Ratus, Setiawan Sabana (2002) mengatakan suatu karya seni merupakan wujud kreasi estetis seorang seniman yang merefleksikan nilai-nilai kehidupan suatu masyarakat kebudayaannya. Dengan demikian, di samping karya itu mengungkapkan dunia internal (subyektivitas) senimannya, pada saat yang sama juga merupakan refleksi nilai-nilai kehidupan yang berlangsung dalam masyarakatnya.

Melalui kajian terhadap lambang-lambang partai politik ini diharapkan dapat diperoleh peta tentang format budaya visual yang melingkupi partai-partai politik di Indonesia dari masa ke masa. Peta format budaya visual partai-partai politik dari masa ke masa ini pada akhirnya akan memperlihatkan pula sebuah transformasi budaya masyarakat Indonesia.

Di luar itu, melalui kajian ini diharapkan pula terjadi penguatan sinergisitas atau saling mendekati (*reapproachment*) antara sejarah dengan seni rupa dan desain. Pengkajian seni rupa dan desain yang tengah mengalami perkembangan yang sangat dinamis, dengan penelitian ini, diharapkan akan semakin menguat perspektif kesejarahannya, sementara pengkajian sejarah pun akan semakin kaya dengan adanya pengkajian melalui pemanfaatan sumber visual berupa gambar lambang partai-partai politik.

Gambar 1
Lambang empat Partai Politik besar

peraih suara terbanyak
dalam Pemilihan Umum 1955



Gambar 2
Lambang Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum 1971



Gambar 3
Lambang dua Partai Politik dan satu Golongan Karya

setelah kebijakan fusi Partai Politik pada tahun 1973. Lambang-lambang ini menjadi lambang yang digunakan dalam Pemilihan Umum tahun 1977.



Gambar 4

Beberapa lambang Partai Politik yang turut serta dalam Pemilu 1999. Partai-partai politik pemilik kelima lambang ini berhasil masuk dalam jajaran lima besar partai politik peraih kursi DPR terbanyak dalam Pemilu 1999.



Gambar 5

Beberapa lambang Partai Politik yang turut serta

dalam Pemilu 2004. Partai-partai politik pemilik ketujuh lambang ini berhasil masuk dalam jajaran tujuh besar partai politik peraih kursi DPR terbanyak dalam Pemilu 2004.



Kesimpulan (Tentatif)

Berdasarkan kajian sementara terhadap gambar lambang-lambang partai politik, dapat ditarik beberapa kesimpulan sementara, sebagai berikut:

- Partai Politik pada umumnya memanfaatkan simbol-simbol yang telah dikenal (menjadi pengetahuan umum), atau telah menjadi konvensi bersama. Oleh karena itu, simbol-simbol yang terdapat dalam lambang negara, Pancasila, menjadi simbol yang selalu muncul dan digunakan oleh partai-partai politik, sejak pemilihan umum 1955 hingga pemilihan umum 2004. Adapun simbol Pancasila yang selalu muncul sebagai lambang partai politik sejak pemilihan umum 1955 hingga 2004 adalah simbol banteng. Selain banteng, simbol Pancasila yang sering digunakan adalah simbol bintang.
- Partai-partai politik yang memilih simbol banteng merupakan partai-partai politik yang berideologi nasionalis. Pemilihan simbol banteng sebagai lambang partai politik dari golongan nasionalis, mulai muncul sejak pemilihan umum 1955 dan terus berlangsung secara konsisten hingga pemilihan umum 2004: Partai Buruh dan PNI (Front Marhaenis) dalam Pemilu 1955; Partai Nasional Indonesia dalam Pemilu 1971; Partai

Demokrasi Indonesia dalam Pemilu 1977; PNI, PDI Perjuangan, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, PDI. Partai Nasional Demokrat (PND), dan Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) dalam Pemilu 1999; PNI (Marhaenis), PDI, PDIP, dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dalam Pemilu 2004.

- Simbol bintang yang selama ini dipandang sebagai representasi politik Islam, dalam kenyataannya sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai representasi Islam ataupun partai politik berbasis Islam. Representasi simbol bintang sebagai representasi Islam atau partai politik Islam dapat dikatakan hanya terjadi dalam pemilihan umum 1971. Saat itu dari sepuluh partai politik peserta pemilu, ada tiga partai politik yang menggunakan simbol bintang, yakni Nahdhatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia. Di luar pemilu 1971, simbol bintang sama sekali tidak bisa direpresentasikan sebagai simbol Islam atau partai politik Islam. Baik dalam pemilu 1955, 1999, dan 2004, simbol bintang juga digunakan oleh partai politik non Islam, seperti misal Partai Murba dan Partai Republik (Pemilu 1955), Partai Rakyat Demokrat dan Partai Uni Demokrasi Indonesia (Pemilu 1999), serta Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Demokrat (Pemilu 2004). Bahkan dalam Pemilu 1977, simbol bintang sama sekali tidak muncul sebagai simbol yang digunakan oleh ketiga kontestan peserta pemilu, termasuk satu-satunya partai politik yang dianggap sebagai representasi partai Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan.
- Di antara 24 partai politik yang mengikuti Pemilu Tahun 2004 tercatat hanya dua partai politik yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah kepulauan sebagai salah satu unsur simbolnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Daerah.
- Pemilihan kepulauan Indonesia sebagai simbol oleh Partai Kebangkitan Bangsa tidak saja memberi makna sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara tetapi memiliki makna tentang kesadaran partai akan Indonesia yang sangat pluralis. Bagi Partai Persatuan Daerah pemilihan kepulauan Indonesia sebagai salah satu unsur simbol partai sejalan dengan simbol payung yang menyertainya ingin memberi makna sebagai partai yang benar-benar memayungi kepentingan daerah-daerah di seluruh Indonesia.

DAFTAR SUMBER

- Ankersmit, F.R. (1987): Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah, Terjemahan oleh Dick Hartoko, PT Gramedia, Jakarta..
- Barthes, Roland (2007): Membedah Mitos-mitos Budaya Massa: Semiotika atau Sosiologi Tanda Simbol, dan Representasi. Terjemahan oleh Ikramullah Mahyuddin, Jalasutra, Yogyakarta dan Bandung.
- Budiardjo, Miriam (1986): Dasar-dasar Ilmu Politik, Karunika, Jakarta, 6, 10.
- Burke, Peter (2001): Sejarah dan Teori Sosial, Terjemahan oleh Mestika Zed dan Zulfami, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Darmaprawira, Sulasmi (2002): Warna: Teori dan Kreativitas Penggunaannya, Penerbit ITB, Bandung.
- Dienaputra, Reiza D (1994): Partai Politik di Indonesia. Studi tentang Inventarisasi Partai-partai Politik Sejak Pra Kemerdekaan hingga Pasca Kemerdekaan, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Evans, Kevin (2009) "Politik 'Aliran' Yang Mana?", Tempo, Edisi 3 Maret-5 April 2009, hal. 56-57.
- Fichner-Ratus, Lois (1995): Understanding Art, Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
- Friedrich, Carl J. (1967): Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice on Europe and America, Blaisdell Publishing Company, Waltham, 419.
- Garaghan, Gilbert J. (1957): A Guide To Historical Method, Fordham University Press, New York, 103-123.
- Harsojo (1999): Pengantar Antropologi, Putrabardin, Bandung, 93-94.
- Hooper-Greenhill, Eilean (2006): Museums and the Interpretation of Visual Culture, Routledge, London and New York, 14.

- Karim, M. Rusli (1983): *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono (1992): *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kridalaksana, Harimurti (1995): *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 557, 941.
- Kuntowijoyo (1994): *Metodologi Sejarah*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Pointon, Marcia (1997): *History of Art: A Students' Handbook*, Fourth Edition, Routledge, London and New York
- Raho, Bernard (2007): *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sabana, Setiawan (2002): *Spiritualitas dalam Seni Rupa Kontemporer di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina sebagai Wilayah Kajian*, Disertasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Sachari, Agus (2007): *Budaya Visual Indonesia*, Erlangga, Bandung, 1-2.
- dan Yan Yan Sunarya (2001): *Desain dan Dunia Kesenirupaan Indonesia dalam Wacana Transformasi Budaya*, Penerbit ITB, Bandung, 82-83.
- Sjamsuddin, Helius (2007): *Metodologi Sejarah*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sobur, Alex (2006): *Semiotika Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sunarto, Priyanto (2005): *Metafora Visual Kartun Editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950 - 1957*, Disertasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Surbakti, Ramlan (1992): *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 116.
- Suryadinata, Leo (1992): *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, LP3ES, Jakarta.

Suryakusuma, Julia I. (Koordinator Umum) (t.t.): API: Almanak Parpol Indonesia, SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (ed.) (2005): Teori-teori Kebudayaan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Van Peursen, C.A. (1988): Strategi Kebudayaan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 10-11.